

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dan instansi didalamnya memiliki sebuah anggaran untuk melaksanakan kegiatannya . Anggaran tersebut di alokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam instansi tersebut . Di dalam instansi terdapat bidang atau divisi tertentu untuk membuat program kinerja dan anggaran kinerja agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat . Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan , belanja dan biaya lain-lain yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode .

Dalam meningkatkan kinerja setiap daerah diberlakukanlah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengakibatkan banyak perubahan terutama dalam pengelolaan anggaran daerah . Adanya undang – undang tersebut didasari pada otonomi daerah ditunjukan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat yang tercermin dari pengelolaan keuangan daerah baik dari anggaran dan realisasi dari anggaran tersebut .

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki instansi pendukung yang strategis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Anggaran yang ada di Provinsi DKI Jakarta cukuplah besar dibandingkan dengan daerah lainnya yang tersebar di Indonesia . Namun menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) , Penyerapan anggaran Pemda DKI ditengarai masih rendah hal itu menjadi indikator rendahnya kinerja pemerintah daerah karena tidak mampu merealisasikan seluruh program dengan baik . APBD DKI Jakarta pada 2008-2011 lalu berada dalam kondisi surplus . Akan tetapi pada tahun 2012 ini malah terancam defisit hingga Rp 2,1 t riliun, minus sembilan persen dari total belanja daerah . Anggaran yang tidak terserap masih di atas 10 persen, jika dirata – rata dari 2008 - 2012 anggaran tidak terserap telah mencapai 20,3 persen . Tingginya anggaran yang tidak terserap otomatis jadi indikator rendahnya kinerja pemerintah, sehingga tidak mempunya merealisasikan seluruh program dengan baik , terang Direktur Resource Centre Seknas Fitra.¹

Tidak hanya dari Forum Indonesia ,Anggota DPDRD DKI Jakarta beranggapan tentang penyerapananggaran di Jakarta . Menurut Anggota Komisi C (keuangan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus . Minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga akhir Oktober 2013 mendapat kritikan keras dari

¹2012, <http://news.detik.com/rendahnya-penyerapan-anggaran-dki-berbanding-lurus-dengan-kinerja>
(Diakses tanggal 6 Maret 2014 , 22 : 06)

kalangan legislatif. Ia mempertanyakan penyerapan yang bahkan belum juga mencapai 50 persen. Masa sudah mau November begini masih kurang dari setengah penyerapan? Apa saja yang sudah dikerjakan? Jangan-jangan baru buat bayar gaji, tunjangan sama TALI (Telepon Air Listrik dan Internet) . Menurut Alaydrus ,penyerapan rendah ini sangat tidak wajar. Ia meminta ada evaluasi yang jelas dari Gubernur DKI kepada anak buahnya. Alaydrus menilai tidak mungkin penyerapan pada Desember mendatang mencapai 90 persen atau lebih .

Namun menurut Gubernur DKI Jakarta, dalam rapat perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013. Hingga kemarin, penyerapan anggaran hanya mencapai angka 42,42 persen dari total APBD 2013 senilai RP 50 triliun lebih. Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, yakni 59,18 persen. Artinya tertinggal sekitar 13,76 persen, ujar Jokowi.²

Dalam membuat pertanggung jawaban secara akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah , maka terdapat Undang-undang No 17 tahun 2003 pasal 31 tentang pertanggung jawaban APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Neraca , Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) . Dan tertera dalam

²2013 , [http://www.tribunnews.com/ penyerapan-apbd-dki-dipertanyakan](http://www.tribunnews.com/penyerapan-apbd-dki-dipertanyakan)
(Diakses tanggal 6 Maret 2014 , 22 : 18)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 37 Tahun 2011 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah .

DKI Jakarta merupakan pintu gerbang utama dalam berinvestasi terutama untuk kalangan dunia usaha . Oleh sebab itu , Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan badan pemerintah yang memiliki andil besar untuk menarik para calon investor agar menanamkan modalnya di Jakarta. Anggaran yang didapat BPMP selain digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung yang memiliki pengeluaran seperti belanja pegawai , belanja barang dan jasa dan belanja modal . Belanja tersebutlah yang menjadikan keingin tahuan penulis untuk mengobservasi realisasi anggaran dan kinerja yang ada di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta .

Realisasi anggaran sangat penting bagi sebuah organisasi , karena dari hasil realisasi anggaran tersebut organisasi akan mengetahui seberapa besar anggaran yang digunakan dalam satu periode dan dapat mengetahui kinerja yang ada di organisasi tersebut .

Dari penjelasan tersebut penulis memiliki keinginan untuk membahas tentang anggaran dan kinerja para pegawai terhadap anggaran yang diberikan yang terdapat di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) . Penulis ingin membahas lebih jauh tentang **“Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah mengenai anggaran yang terdiri dari ;

- a. Bagaimana realisasi anggaran belanja pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dengan perhitungan Analisis Varians Belanja?
- b. Bagaimana kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dengan perhitungan Rasio Aktivitas dan Efisiensi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini memiliki banyak pengetahuan untuk dikuatuhui diantaranya ;

- a. Mengkaji anggaran pendapatan dan belanja pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta .
- b. Menelaah kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta terhadap terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah .

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tersebut untuk diketahui dan dipahami agar menjadi sebuah informasi yang berguna bagi perkembangan pengetahuan dan bagi masyarakat luas serta bagi pihak Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta;

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pejabat terkait di BPMP khususnya pejabat yang berwenang merencanakan dan menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan program kerja .
- b. Realisasi anggaran ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki perencanaan anggaran yang ada sehingga dapat di optimalkan .
- c. Untuk melihat kinerja dari Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyerapan anggaran .